

Penghapusan Wilayah Kerja Pendidikan: Respon Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pengawas Satuan Pendidikan

Nuril Eka Fani Agustin*, Iva Yulianti Umdatul Izzah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Kelurahan Gunung Anyar,
Kecamatan Gunung Anyar No. 682, Surabaya, Jawa Timur, 60294

E-mail: [*nurilekafani@gmail.com](mailto:nurilekafani@gmail.com), ivayulianti@uinsby.ac.id

Article History:

Received	: 18/09/2025
Received in revised form	: 30/12/2025
Accepted	: 24/02/2026

Abstract: The Working Area, commonly referred to as Wilker, is a small unit located in each sub-district. Within the Working Area unit, there is a structure consisting of a regional coordinator (Korwil), staff, treasurer, and education unit supervisor. The existence of Wilker is considered important because it is geographically located in the area of the education unit supervisor's partner school, namely in each sub-district, thus facilitating the supervisor in providing guidance to schools. The policy to eliminate Wilker has created a new climate, requiring education unit supervisors to adapt and face challenges related to work mobility. This study uses a qualitative approach by interviewing representatives of supervisors, inspectors, and the Jombang District Education and Culture Office. This study aims to analyze the impact of the Wilker abolition policy on the performance of education supervisors in Jombang using symbolic interactionism theory as an analytical tool. The results of this study indicate that the elimination of Wilker received responses in the form of disappointment and negotiations regarding fingerprint rules, adaptation to digitization, and adjustments to coaching strategies, which were interpreted as symbolic changes in the work system that had implications for perceptions of effectiveness and the performance patterns of education unit supervisors.

Keywords: Education Policy, Bureaucratic Adaptation, Educational Supervision, Symbolic Interactionism

Abstrak: Wilayah Kerja atau biasa disebut Wilker adalah unit satuan kecil yang kedudukannya berada di masing-masing kecamatan. Dalam satuan Wilayah Kerja, terdapat struktur diantaranya koordinator wilayah (Korwil), staff, bendahara, dan pengawas satuan pendidikan. Keberadaan wilker dianggap penting karena secara geografis terletak di wilayah sekolah dampingan pengawas satuan pendidikan, yaitu berada di kecamatan masing-masing, sehingga memudahkan pengawas dalam melakukan binaan ke sekolah. Dengan adanya kebijakan penghapusan wilker berdampak pada terciptanya iklim baru, sehingga mengharuskan pengawas satuan pendidikan beradaptasi dan mengalami kendala terkait mobilitas kerja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara kepada perwakilan pengawas, penilik, dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari adanya kebijakan penghapusan Wilker terhadap kinerja pengawas satuan pendidikan di Jombang dengan menggunakan teori interaksionalisme simbolik sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan Wilker mendapat respon berupa kekecewaan dan negosiasi aturan fingerprint, adaptasi digitalisasi, dan

penyesuaian strategi pembinaan dimaknai sebagai perubahan simbolik dalam sistem kerja yang berimplikasi pada persepsi efektivitas serta pola kinerja pengawas satuan pendidikan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Adaptasi Birokrasi, Supervisi Pendidikan, Interaksionalisme Simbolik

PENDAHULUAN

Guru adalah seorang pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam konteks pendidikan, guru diposisikan sebagai agen pembaruan yang berperan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai aktor utama dalam pembelajaran, guru melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, guru menghadapi berbagai kendala dan tantangan, mulai dari perubahan kurikulum yang dinamis, beban administrasi yang kompleks, hingga tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi pembelajaran yang terus berkembang.

Peran dan tanggung jawab guru yang diemban, menuntut adanya upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengajaran dan meningkatkan profesionalisme guru. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melalui supervisi pembelajaran. Supervisi dapat dimaknai sebagai serangkaian bantuan profesional yang diberikan kepada guru dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan pengawasan oleh kepala sekolah maupun pengawas satuan pendidikan. Tujuan utama supervisi ini adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran agar selaras dengan tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan terjadi perbaikan situasi belajar mengajar yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan prestasi siswa (Imron, 2022).

Guru pada sistem birokrasi pendidikan, tanggung jawab pelaksanaan pengawasan berada pada pengawas satuan pendidikan sebagai pemegang otoritas penjaminan mutu di lapangan. Sederhananya, tenaga pendidik seperti guru dan kepala sekolah membutuhkan dukungan teknis dan pedagogis yang sistematis, sehingga adanya supervisi ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas satuan pendidikan.

Pengawas satuan pendidikan bertindak sebagai aktor, dan supervisi pendidikan adalah bentuk kegiatan yang mereka lakukan.

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh pengawas satuan pendidikan terorganisasi dalam suatu struktur tata kelola wilayah yang sistematis. Untuk menyediakan pusat koordinasi kerja sekaligus mendekatkan layanan pembinaan kepada satuan pendidikan, Dinas Pendidikan membentuk unit operasional yang dikenal sebagai Wilayah Kerja (Wilker). Wilker merupakan wilayah geografis pada tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan guna menunjang pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan. Sehingga pengawas bekerja berdasarkan daerah binaan yang telah dibagi untuk menjamin efektivitas pengawasan.

Wilker pendidikan berperan sebagai penghubung antara Dinas Pendidikan dengan satuan pendidikan yaitu SKB, TK, SD, dan SMP di tingkat kecamatan. Wilker dipimpin oleh Koordinator Wilayah (Korwil) yang merupakan seorang pengawas satuan pendidikan. Tugas pengawas satuan pendidikan adalah membantu Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di wilayah kecamatan, meliputi pengawasan, pembinaan, dan administrasi sekolah (Setyawati *et al.*, 2020). Meskipun wilker bukan struktur organisasi formal, operasionalnya diatur oleh Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Tugas pengawas satuan pendidikan adalah sebagai pengendali mutu pendidikan (Setyawati *et al.*, 2020). Akan tetapi, di Kabupaten Jombang, terdapat kebijakan penghapusan Wilker. Keputusan ini sedikit berpengaruh terhadap tugas pengawas walau tidak secara signifikan.

Kebijakan penghapusan Wilayah Kerja (Wilker), terdapat transformasi peran pengawas sekolah diatur dalam Perdirjen GTK 4831 Tahun 2023 dari peran yang lebih bersifat kontrol dan evaluasi menjadi pendamping yang mendukung kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai seorang pengawas, regulasi tentang kompetensi diatur dalam Perdirjen GTK No. 7328 Tahun 2023 (Ditjen GTK Kemendikbudristek, 2023). Dengan adanya

penghapusan wilker dikhawatirkan akan menghambat pengawasan dan administrasi sekolah, mempersulit pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Hilangnya peran Wilker sebagai fasilitator komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di tingkat kecamatan berisiko menurunkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan, khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan oleh pengawas satuan pendidikan.

Perubahan struktur organisasi dalam konteks sosiologi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang melalui penghapusan Wilayah Kerja (Wilker) berdampak pada praktik kerja pengawas satuan pendidikan sebagai aktor yang bertugas di lapangan. melalui teori interaksionalisme George Hebert Mead dan Hebert Blumer, diketahui bahwa tindakan individu didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap suatu objek, situasi, atau simbol. Makna tersebut terbentuk dari proses interaksi sosial. Dengan demikian, perubahan ruang kerja dari Wilker ke Dinas Pendidikan tidak hanya sebuah relokasi fisik, tetapi juga perubahan simbolik yang berpotensi menggeseser makna peran pengawas dalam struktur birokrasi pendidikan.

Wilayah Kerja dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai simbol ruang profesional sebagai pusat koordinasi, legitimasi otoritas, dan dasar identitas struktural pengawas. Ketika ruang tersebut dihapus dan digantikan oleh sistem kerja yang kosong di Dinas Pendidikan, terjadi perubahan pola interaksi, pola koordinasi, serta struktur komunikasi yang membentuk ulang pengalaman kerja pengawas. Proses interaksi dalam struktur baru inilah yang kemudian melahirkan interpretasi dan redefinisi makna atas identitas profesional mereka. Oleh karena itu, interaksionisme simbolik relevan digunakan karena mampu menjelaskan bagaimana makna, simbol, dan interaksi dalam perubahan ruang kerja tersebut mempengaruhi konstruksi identitas profesional sekaligus berdampak pada kinerja pengawas di lapangan.

Studi mengenai pengawas satuan pendidikan sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya adalah penelitian yang menjelaskan tugas penting pengawas dalam proses peningkatan hasil belajar, yaitu dengan melakukan kegiatan coaching kepada kepala sekolah secara intens mengenai strategi kepala sekolah (Ritonga *et al.*, 2023), hal ini dibuktikan dengan adanya realitas lapangan,

dimana disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan administrasi yang benar, kepala sekolah tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola administrasi sekolah (Lubis, 2022). Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui kegiatan supervisi manajerial melakukan pembinaan dan pengembangan oleh pengawas satuan pendidikan kepada kepala sekolah. Selain itu, Studi lain juga menjelaskan peran pengawas dalam satuan pendidikan, yaitu sebagai penjamin mutu pendidikan dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengajaran oleh guru melalui supervisi akademik dengan adanya pembinaan, pelatihan dan manjerial, dengan demikian kualitas dan mutu sekolah meningkat sehingga berdaya saing (Erwiati *et al.*, 2022).

Kajian literatur tersebut, diketahui banyak studi yang membahas terkait tugas pengawas sekolah. Walaupun demikian, terdapat celah kekosongan yang ditemukan peneliti dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dimana belum ada studi yang membahas terkait kebijakan baru tentang adanya penghapusan Wilayah Kerja pendidikan khususnya di Kabupaten Jombang yang dahulu merupakan kantor tempat kerja para pengawas satuan pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis dampak dari adanya kebijakan penghapusan Wilker terhadap kinerja pengawas satuan pendidikan di Jombang dengan menggunakan teori interaksionalisme simbolik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan menggali informasi terkait respon, pengalaman, perasaan dan pemaknaan pengawas satuan pendidikan terhadap kebijakan penghapusan Wilayah Kerja, dan dampaknya terhadap kinerja serta kendala yang timbul dari adanya kebijakan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Pamungkas *et al.*, 2025) dengan melakukan wawancara langsung. Penelitian ini dilakukan di kantor pengawas satuan pendidikan yang terletak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan panduan pertanyaan, tetapi tetap fleksibel dalam

proses wawancara dengan melakukan eksplorasi pertanyaan mengikuti jawaban responden dari responden. Wawancara dilakukan kepada 3 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan perwakilan Pengawas Sekolah Dasar, Penilik Pertama, dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemilihan informan oleh peneliti dilakukan dengan berdasarkan rekomendasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mempertimbangkan kriteria peneliti yaitu aspek kompetensi manajerial serta ketersediaan informan dalam memberikan data yang mendalam. Prinsip etika penelitian diterapkan dengan memberikan prosedur informed consent dengan menjamin kerahasiaan identitas informan guna memastikan ketersediaan para informan secara sukarela dan menjaga konfidensialitas data. Dalam pelaksanaannya, proses wawancara berkembang secara dinamis di mana terdapat keterlibatan spontan dari rekan sejawat informan yang memberikan penguatan data. Hal ini membantu peneliti menangkap aspirasi kolektif dan memastikan bahwa informasi yang diberikan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, dinamika wawancara yang terjadi secara alami tersebut sekaligus membantu peneliti dalam memvalidasi kredibilitas data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Habermas (Wulan & Mahendra, 2025) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai pendalaman, penelitian ini menggunakan perspektif interaksionalisme simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer guna menganalisis bagaimana makna, simbol, dan interaksi sosial dibentuk serta dimaknai oleh aktor dalam praktik tata kelola pasca penghapusan Wilker.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Pengawas Satuan Pendidikan

Perubahan kebijakan penghapusan kantor Wilayah Kerja (Wilker) di Kabupaten Jombang memberikan dampak terhadap pengalaman kerja pengawas dan penilik. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua responden yang telah menjabat lebih dari empat tahun, relokasi tempat kerja dari kantor Wilker di tingkat kecamatan ke kantor pusat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Jombang menimbulkan tantangan baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah munculnya perasaan kecewa, khususnya pada pengawas sekolah dasar, karena mereka merasa jarak dengan satuan pendidikan binaan menjadi lebih jauh, baik secara geografis maupun emosional. Kondisi ini dinilai memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pendampingan dan supervisi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu pengawas:

Respon teman-teman pengawas, khususnya pengawas SD dan Koordinator Wilayah, merasa sedikit kecewa. Sebab, perpindahan kedudukan dari kantor Wilker di kecamatan ke Dinas Pendidikan membuat jarak dengan satuan pendidikan dan kepala sekolah terasa lebih jauh. Secara psikologis, perubahan ini menciptakan jarak emosional, ditambah lagi secara fisik jarak tempuh pun memang bertambah. Dulu, saat masih di kantor Wilker, kami berada di kecamatan yang sama sehingga jauh lebih dekat untuk mendampingi kegiatan siswa, guru, maupun kepala sekolah. Dibandingkan sekarang yang berpusat di Dinas Pendidikan Jombang, akses ke sekolah binaan terasa tidak sedekat dulu” (Pengawas, Wawancara, 30 April 2025).

Sebelum penghapusan kantor Wilker, pengawas dan penilik merasakan kedekatan yang lebih intens dengan satuan pendidikan karena lokasi kerja berada di dalam atau dekat dengan wilayah binaan. Kondisi ini memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan sekolah. Setelah relokasi, mereka diwajibkan terlebih dahulu hadir di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan absensi (fingerprint) serta mengikuti apel sebelum menuju sekolah binaan. Konsekuensinya, waktu kedatangan ke satuan pendidikan menjadi lebih siang, sehingga memengaruhi durasi dan kedalaman pelaksanaan pemantauan.

Secara struktural, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas dan penilik tidak mengalami perubahan signifikan setelah penghapusan Wilker. Mereka tetap melaksanakan pemantauan, pendampingan, dan pembinaan terhadap satuan pendidikan. Namun, relokasi kantor memunculkan perubahan dalam pola dan kondisi kerja sehari-hari. Salah satu perubahan yang dirasakan adalah penggunaan ruang kerja terbuka di kantor dinas. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengawas:

Dulu saat masih di Wilker, privasi kami lebih terjaga dan suasana ruangan jauh lebih nyaman. Sekarang kondisinya berbeda, satu ruangan harus dihuni oleh 23 pengawas. Kurangnya privasi ini sangat terasa

dampaknya, karena secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada produktivitas dan kinerja kami sehari-hari. (Pengawas, Wawancara, 29 April 2025).

Selain persoalan privasi, responden juga menyebut adanya tantangan adaptasi terhadap mobilitas baru. Kewajiban hadir di kantor dinas membuat mereka harus berangkat lebih pagi, terutama karena kondisi lalu lintas yang padat. Ruang kerja yang digunakan saat ini juga dinilai belum sepenuhnya ideal. Suhu ruangan terasa panas akibat bangunan yang relatif pendek dan pendingin udara (AC) yang belum berfungsi optimal. Meskipun demikian, pihak dinas telah menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti listrik, jaringan internet (WiFi), meja kerja individual dengan stopkontak di masing-masing meja, kipas angin, serta mesin fingerprint untuk absensi. Namun, fasilitas tersebut dinilai masih belum memadai. Sebagaimana disampaikan oleh responden:

Pihak Dinas Pendidikan sebenarnya telah berupaya meningkatkan kenyamanan di ruangan baru tersebut. Misalnya, dengan menyediakan meja individu yang dilengkapi colokan listrik, kipas angin, jaringan WiFi, serta mesin fingerprint untuk absensi. Namun, fasilitas ini dirasa masih kurang memadai. Ruangan tetap terasa panas karena langit-langit bangunan yang rendah serta jumlah kipas angin yang tidak sebanding dengan luas ruangan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti proyektor juga belum tersedia dari pihak Dinas. (Pengawas, Wawancara. 30 April 2025).

Selain perubahan ruang dan mobilitas kerja, keterbatasan waktu pemantauan juga mendorong munculnya alternatif strategi pendampingan. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pemanfaatan media daring sebagai sarana supervisi ketika terjadi benturan jadwal atau jarak tempuh yang cukup jauh. Digitalisasi tidak muncul sebagai kebijakan utama, melainkan sebagai respons adaptif atas kondisi kerja pasca penghapusan Wilker. Pengawas memandang penggunaan Zoom atau Google Meet sebagai solusi yang efisien dan memungkinkan kegiatan tetap berjalan. Namun, mereka juga mengakui adanya keterbatasan dalam kualitas pengawasan secara daring. Sebagaimana diungkapkan:

Ketika banyaknya kegiatan yang bersamaan atau jaraknya jauh, sangat memungkinkan juga kita menggunakan media online seperti Zoom atau Google Meet. Itu juga adalah saran dari dinas pendidikan bidang

ketenagaan bahwa pembinaan dan pendampingan bisa dilakukan secara daring. Tapi walaupun demikian, esensinya menurut saya agak kurang, karena kita tidak bisa melihat sejauh mana keseriusan, kesungguhan kepala sekolah mengikuti zoom karena kurang terpantau. (Pengawas, Wawancara, 30 April 2025).

Berbeda dengan pengawas yang menganggap pemantauan daring sebagai solusi, penilik menilai bahwa pendampingan daring kurang efektif dan cenderung merepotkan tenaga pendidik, terutama karena harus mengondisikan anak didik sekaligus mengikuti pemantauan secara virtual. Selain itu, observasi langsung dinilai lebih mampu menghasilkan data yang otentik:

Menurut saya daring itu merepotkan untuk pihak tenaga pendidik. Di sisi lain mereka harus mengkondisikan anak muridnya, ditambah mereka harus merekam kegiatan itu dari awal-akhir atau kita harus videocall. Lagipula saya pribadi lebih nyaman monitoring langsung ke tiap sekolah untuk mendapatkan data yang otentik dengan melihat langsung. (Penilik, Wawancara, 29 April 2025)

Penilik juga menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan pemantauan. Sebelum penghapusan Wilker, mereka dapat langsung menuju satuan pendidikan sejak pagi dan melakukan pendampingan secara lebih menyeluruh, seperti diskusi evaluatif, penyusunan perangkat ajar, serta penataan lingkungan belajar. Setelah relokasi, kewajiban mengikuti apel dan melakukan fingerprint terlebih dahulu menyebabkan waktu tiba di sekolah menjadi lebih siang, sehingga durasi pemantauan berkurang. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, penilik memaksimalkan pengumpulan data dalam kunjungan singkat selama dua hingga tiga hari ke beberapa satuan pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penilik:

Sekarang kalau mau pemantauan, sampai sekolah bisa sekitar setengah sembilan karena harus absen dulu di dinas. Padahal di PAUD jam segitu sudah masuk kegiatan inti. Waktu jadi terasa terkuras, tenaga juga lebih capek di jalan. Akhirnya, yang seharusnya pemantauan bisa belasan hari, kami manfaatkan cukup dua atau tiga hari saja, sekali datang harus dapat sebanyak mungkin. (Penilik, Wawancara, 29 April 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tupoksi tidak berubah, pola pelaksanaan pemantauan mengalami penyesuaian akibat

keterbatasan waktu, jarak, dan tenaga yang dirasakan pasca penghapusan Wilker.

Penghapusan Wilker juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan kolektif di wilayah binaan. Di Kecamatan Megaluh, misalnya, terdapat agenda rutin Sinau Bareng yang sebelumnya mudah dilaksanakan di aula Wilker. Kini, frekuensi kegiatan tersebut menurun karena keterbatasan mobilitas dan tidak tersedianya ruang representatif di tingkat kecamatan. Jika sebelumnya koordinasi cukup dilakukan dengan membuat undangan sederhana dan berkumpul di aula Wilker, saat ini kegiatan hanya dapat dilaksanakan sekitar satu kali dalam sebulan agar lebih efisien. Sebagaimana disampaikan oleh penilik Dabin Megaluh:

Dulu kalau ada yang perlu dipelajari, saya tinggal bikin undangan dan kumpul di aula Wilker. Sekarang paling bisa sebulan sekali karena mobilitasnya lebih berat, jadi sekalian dikumpulkan biar tidak bolak-balik. (Penilik, Wawancara, 29 April 2025).

Sebagai strategi adaptasi, penilik menjalin kerja sama dengan organisasi profesi HIMPAUDI untuk mengajukan surat undangan kegiatan, yang kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan agar diterbitkan surat tugas. Dengan adanya surat tugas tersebut, penilik tidak perlu kembali ke kantor dinas untuk melakukan fingerprint setelah kegiatan selesai. Strategi ini dinilai dapat mengurangi beban perjalanan, meskipun hingga waktu wawancara surat tersebut masih dalam proses.

Selain itu, persoalan transportasi menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi penilik yang berdomisili jauh dari kantor dinas. Salah satu responden menyebutkan adanya penilik dari Kecamatan Wonosalam yang harus menggunakan ojek dengan biaya sekitar Rp100.000 setiap kali hadir ke dinas, belum termasuk biaya tambahan karena pengemudi menunggu hingga kegiatan selesai. Sebagaimana diungkapkan:

Ada teman dari Wonosalam yang tidak bisa naik motor, jadi setiap ke dinas harus ojek sekitar seratus ribu. Kadang juga harus memberi uang makan karena yang mengantar menunggu. (Penilik, Wawancara, 29 April 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghapusan Wilker tidak hanya berdampak pada pola kerja dan intensitas kegiatan pembinaan, tetapi juga

menambah beban mobilitas dan biaya yang dirasakan sebagian pengawas dan penilik.

Harapan utama yang disampaikan oleh para pengawas dan penilik berkaitan dengan fleksibilitas sistem kehadiran dan pemanfaatan kembali ruang kerja di tingkat kecamatan. Mereka mengusulkan agar sistem fingerprint tidak hanya dipusatkan di Dinas Pendidikan, melainkan dapat dilakukan di kecamatan atau satuan pendidikan binaan. Usulan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya beban mobilitas pasca penghapusan Wilker. Selain itu, terdapat harapan agar bekas kantor Wilker dapat difungsikan kembali sebagai sekretariat kegiatan atau pusat informasi yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika terdapat kebutuhan mendesak. Harapan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan fleksibilitas bukan semata persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan efektivitas kerja dan efisiensi mobilitas. Selain itu, harapan untuk mengaktifkan kembali bekas kantor Wilker menandakan bahwa ruang fisik tersebut masih memiliki makna penting sebagai pusat koordinasi dan simbol kedekatan struktural dengan wilayah binaan. Dengan demikian, penghapusan Wilker tidak hanya berdampak pada teknis kerja, tetapi juga pada dimensi simbolik kehadiran dan aksesibilitas dalam praktik pengawasan dan pembinaan.

Secara keseluruhan, penghapusan Wilker memunculkan beragam respons yang bergerak dari keterkejutan awal menuju proses adaptasi bertahap. Pada tahap awal, perubahan ini dirasakan sebagai peningkatan beban mobilitas, keterbatasan ruang koordinasi, serta penyesuaian administratif yang menuntut energi dan waktu lebih besar. Namun seiring berjalannya waktu, pengawas dan penilik mulai mengembangkan berbagai strategi adaptif, seperti pengaturan ulang intensitas kegiatan, pemanfaatan teknologi daring, kerja sama dengan organisasi profesi, hingga pengajuan mekanisme surat tugas untuk mengurangi beban perjalanan. Meskipun demikian, proses adaptasi tersebut tidak sepenuhnya menghapus kebutuhan akan dukungan struktural. Harapan akan fleksibilitas sistem kehadiran dan pemanfaatan kembali ruang eks-Wilker menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas fisik dan kebijakan yang responsif tetap dipandang penting dalam

menunjang efektivitas kerja. Dengan demikian, dinamika penghapusan Wilker tidak hanya mencerminkan perubahan teknis administratif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aktor-aktor di dalamnya merespons, menegosiasikan, dan memaknai ulang ruang serta tata kelola kerja dalam konteks struktural yang baru.

A. Analisis Teori Interaksionalisme Simbolik

Teori interaksionalisme simbolik adalah salah satu teori sosiologi yang berfokus pada pembentukan realitas sosial dimana individu menciptakan makna dan membangun realitas sosial melalui interaksi, komunikasi, dan penggunaan simbol-simbol seperti bahasa, isyarat, maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini dikembangkan oleh George Herbert Mead dan istilah nama interaksionalisme simbolik dipopulerkan oleh Herbert Blumer (Kholidi *et al.*, 2022). Menurut Herbert Mead individu dan pikiran manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan komunikasi. Konsep pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*) (Ritzer, 2010). Mead menunjukkan bahwa manusia berinteraksi dengan satu sama lain melalui penggunaan simbol, seperti bahasa dan gerak tubuh, yang memiliki makna bersama. Menurut Mead, manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol dalam menciptakan makna. Manusia dengan pikiran akan melakukan percakapan internal dengan diri sendiri sebelum mengambil tindakan. Sehingga perilaku manusia bukan respon otomatis melainkan hasil dari proses interpretasi.

Prinsip utama teori interaksionalisme simbolik menurut Herbert Blumer adalah bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka bentuk (*meaning*). Makna tersebut tidak muncul dengan sendirinya, ia terbentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial dengan menggunakan bahasa sebagai alat utamanya (*language*). Kemudian manusia melakukan proses berfikir untuk mengolah makna tersebut guna menentukan tindakan selanjutnya (*Thought*) (Aksan *et al.*, 2009).

Singaktnya, teori interaksionalisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer menekankan bahwa realitas sosial bersifat dinamis dengan adanya kontruksi melalui proses interaksi dan

pemaknaan yang terus berlangsung (Bijaksana, 2025). Dalam konteks penghapusan Wilayah Kerja (wilker) di Kabupaten Jombang, perubahan kebijakan ini tidak sebatas pemindahan lokasi kerja secara administratif, tetapi juga mengubah makna simbolik ruang kerja bagi pengawas dan penilik sekolah.

1. Wilker sebagai Simbol Kedekatan dan Identitas Profesional

Berdasarkan temuan lapangan, kantor Wilayah Kerja (wilker) tidak hanya dimaknai sebagai ruang fisik tempat bekerja di tingkat kecamatan, tetapi sebagai simbol kedekatan relasional antara pengawas dan penilik sebagai pendamping satuan pendidikan dengan guru, dan kepala sekolah sebagai tenaga pendidik. Kedekatan geografis tersebut membentuk persepsi psikologis bahwa pengawas dan penilik merupakan bagian integral dari sistem birokrasi pendidikan di tingkat kecamatan.

Dalam perspektif interaksionalisme simbolik, makna sosial terbentuk melalui proses interaksi yang berulang. Wilker, dalam hal ini berfungsi sebagai simbol yang mengonstruksi identitas profesional pengawas sebagai aktor lapangan yang dekat dengan satuan pendidikan. Simbol tersebut merepresentasikan kedekatan relasional, otonomi kerja di wilayah binaan, dan legitimasi sosial sebagai representasi kecamatan.

Ketika kebijakan penghapusan Wilker diberlakukan dan kantor dipusatkan di Dinas Pendidikan, simbol tersebut mengalami redefinisi. Salah satu pengawas menyatakan “agak sedikit kecewa” dan “terasa agak jauh secara psikologis.” Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara memaknai posisi dan peran dalam struktur organisasi. Ketika ruang interaksi berubah, maka simbol kedekatan juga mengalami redefinisi. Dalam teori Mead, proses ini dapat dipahami sebagai perubahan dalam definition of the situation, yaitu ketika individu menafsirkan ulang kondisi sosial yang baru dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan interpretasi tersebut (Siregar, 2016). Rasa kecewa yang muncul bukan sekadar respons emosional, melainkan bagian dari proses negosiasi makna yang berimplikasi pada kedekatan relasional dan pola supervisi pendidikan.

2. Fingerprint sebagai Simbol Kontrol dan penghambat Mobilitas Sosial

Kewajiban melakukan fingerprint di kantor Dinas Pendidikan menghadirkan perubahan dalam pemaknaan kehadiran dan disiplin kerja pengawas. Jika sebelumnya absensi dapat dilakukan lebih dekat dengan wilayah binaan, kini kehadiran dimaknai melalui sistem yang mengharuskan mereka datang ke kantor pusat. Perubahan ini menimbulkan pergeseran simbolik dari kehadiran sebagai aktivitas pembinaan langsung di lapangan menjadi kehadiran administratif yang terikat prosedur formal.

Dalam kerangka interaksionisme simbolik, makna suatu simbol tidak bersifat hakiki, tetapi dibentuk melalui interaksi dan pengalaman sosial (Schröders et al., 2021). Bagi pengawas, fingerprint tidak lagi sekadar alat absensi, tetapi dimaknai sebagai simbol kontrol administratif yang membatasi fleksibilitas kerja. Sistem ini dinilai memperpanjang jarak tempuh, mengurangi waktu monitoring di sekolah binaan, serta menambah beban tenaga dan biaya transportasi

Penilik menyampaikan harapannya bahwa “teman-teman pengawas sekolah ini bisa melakukan absen fingerprint ini juga di wilayah binaannya. Entah itu di sekolah binaannya atau di wilayah kecamatan selain di dinas pendidikan untuk mengefisiensi waktu dan tenaga.” Pernyataan ini menunjukkan adanya proses redefinisi situasi. Ketika ruang interaksi dan mekanisme kerja berubah, simbol kehadiran juga mengalami perubahan makna.

Pemusatan fingerprint di Dinas Pendidikan dinilai tidak efisien karena pengawas harus bolak-balik antara kantor dinas dan wilayah binaan. Bagi pengawas yang wilayah kecamatannya jauh, waktu tempuh dapat mencapai kurang lebih 30 menit, sehingga mengurangi waktu pembinaan dan monitoring. Selain itu, bagi pengawas yang memiliki keterbatasan mobilitas, kebijakan ini berdampak pada peningkatan biaya transportasi. Kondisi ini tidak hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga tenaga.

Dengan demikian, pengawas satuan pendidikan dituntut melakukan penyesuaian melalui strategi adaptasi, seperti pengajuan surat tugas

melalui HIMPAUDI ke dinas pendidikan sebagai bentuk penyesuaian administrative agar perannya sebagai pembina lapangan tetap terlaksanakan. Strategi ini menunjukkan adanya proses negosiasi simbolik terhadap kebijakan. Dengan demikian, fingerprint tidak hanya menjadi instrumen absensi, tetapi simbol perubahan relasi kerja yang berimplikasi pada efisiensi dan praktik supervisi pendidikan.

3. Ruang Kerja sebagai Simbol Privasi dan Profesionalitas

Perubahan ruang kerja dari kantor di Wilker menjadi ruang terbuka yang dihuni dua puluh tiga pengawas dari berbagai wilayah juga merupakan perubahan simbolik. Salah satu pengawas menyatakan bahwa hilangnya privasi berdampak pada produktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kerja tidak dimaknai sekadar sebagai fasilitas fisik, tetapi sebagai bagian dari konstruksi identitas profesiona.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, makna ruang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial di dalamnya (Halik, 2024). Ruang privat sebelumnya dimaknai sebagai simbol otonomi, kewenangan, dan profesionalitas karena memungkinkan konsentrasi, penyusunan laporan supervisi, serta diskusi terbatas tanpa gangguan. Melalui pengalaman berulang dalam ruang tersebut, terbentuk definisi situasi bahwa pengawas adalah aktor profesional yang memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya.

Ketika ruang tersebut berubah menjadi ruang kolektif yang padat dan panas, terjadi perubahan makna terhadap lingkungan kerja. Meskipun pihak dinas telah menyediakan beberapa fasilitas salah satunya kipas angin, para pengawas menilai bahwa kondisi ruang yang relatif pendek, dan jumlah kipas yang terbatas membuat ruangan tetap terasa panas dan kurang nyaman. Pengalaman fisik ini membentuk makna baru bahwa ruang kerja tidak lagi merepresentasikan profesionalitas, melainkan keterbatasan fasilitas dan berkurangnya kenyamanan.

Dalam interaksionisme simbolik, ruang fisik berfungsi sebagai simbol status dan identitas. Kehilangan ruang privat bukan hanya kehilangan fasilitas, tetapi juga perubahan simbol profesionalitas.

Gangguan privasi dimaknai sebagai gangguan terhadap produktivitas dan kualitas kerja. Dengan demikian, perubahan ruang kerja bukan sekadar persoalan teknis penataan kantor, tetapi perubahan simbolik yang berdampak pada persepsi profesionalitas dan efektivitas kerja pengawas.

4. Digitalisasi sebagai Simbol Efisiensi

Pemusatan fingerprint di Dinas Pendidikan yang memperlambat mobilitas pengawas dan penilik mendorong munculnya strategi adaptasi dalam bentuk pengawasan daring melalui Zoom atau Google Meet. Sebagai pelaksana kebijakan, para pengawas berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi struktural yang baru agar tetap dapat menjalankan fungsi pembinaan secara efektif. Digitalisasi ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi menghadirkan simbol baru dalam praktik supervisi, yakni simbol kehadiran virtual. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, makna teknologi dibentuk melalui pengalaman interaksi sosial, bukan melekat secara otomatis pada alat tersebut.

Perbedaan pandangan mengenai digitalisasi dapat dijelaskan melalui teori Mead. Baik pengawas maupun penilik menilai bahwa interaksi tatap muka memiliki kualitas yang lebih “otentik” dibandingkan daring. Dalam pandangan Mead, interaksi langsung memungkinkan proses role-taking (pengambilan peran) yang lebih utuh karena individu dapat membaca ekspresi, gestur, dan respons sosial secara langsung (Astutik, 2017). Ketika Pak Slamet menyatakan bahwa dalam Zoom “kelihatannya ada, tetapi sejauh mana kesungguhannya kurang terpantau”, hal ini menunjukkan bahwa makna “hadir” dalam ruang daring berbeda dengan makna “hadir” secara fisik.

Kehadiran fisik dimaknai sebagai keseriusan, komitmen, dan kontrol sosial yang lebih kuat. Sebaliknya, kehadiran daring dimaknai sebagai efisien namun kurang esensial serta sulit mengontrol partisipasi. Artinya, simbol kehadiran berubah tergantung medium interaksi. Digitalisasi dalam praktik pengawasan bukan sekadar inovasi teknis, tetapi arena negosiasi makna antara efisiensi administratif dan autentisitas profesional.

Secara keseluruhan, respons pengawas dan penilik menunjukkan bahwa mereka bukan aktor pasif yang sekadar menerima perubahan kebijakan, melainkan subjek yang aktif menafsirkan dan menegosiasikan makna perubahan tersebut. Kekecewaan terhadap penghapusan Wilker, strategi administratif, penggunaan pengawasan daring secara selektif, hingga harapan terhadap fleksibilitas fingerprint merupakan bentuk proses interaksi simbolik dalam mendefinisikan ulang situasi kerja mereka.

Dalam perspektif Herbert Blumer, manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu bagi mereka, dan makna itu terbentuk melalui interaksi sosial serta terus dimodifikasi melalui proses interpretasi. Penghapusan Wilker, pemusatan fingerprint, perubahan ruang kerja, dan digitalisasi supervisi menjadi simbol-simbol baru yang ditafsirkan melalui pengalaman konkret di lapangan. Sejalan dengan pemikiran George Herbert Mead, perubahan struktur organisasi menghadirkan kerangka normatif baru yang membentuk refleksi diri (self) pengawas dalam menentukan sikap dan strategi adaptifnya.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan bukan sekadar transformasi administratif, melainkan perubahan simbolik yang memengaruhi konstruksi identitas profesional, pola interaksi, dan praktik supervisi. Dengan demikian, realitas kinerja pasca kebijakan tidak dapat dipahami sebagai dampak linier dari keputusan struktural, tetapi sebagai hasil dari proses konstruksi makna yang terus berlangsung dalam interaksi sosial mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penghapusan Wilayah Kerja (Wilker) Pendidikan tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga menghadirkan perubahan simbolik yang memengaruhi cara pengawas satuan pendidikan memaknai peran, identitas, serta praktik kerjanya. Melalui perspektif interaksionisme simbolik, penelitian ini menunjukkan bahwa respons seperti kekecewaan, negosiasi aturan fingerprint, adaptasi digitalisasi, hingga penyesuaian strategi pembinaan merupakan hasil

proses interpretasi terhadap simbol-simbol baru dalam sistem kerja. Perubahan makna terhadap kedekatan, kehadiran, ruang kerja, dan kontrol administratif berimplikasi pada persepsi efektivitas serta pola interaksi supervisi. Dengan demikian, dinamika kinerja pasca penghapusan Wilker tidak dapat dipahami sebagai dampak struktural yang bersifat mekanis, melainkan sebagai hasil dari proses konstruksi makna yang berlangsung dalam interaksi sosial pengawas dengan lingkungan kerjanya.

Harapan pengawas satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan adalah adanya *fingerprint* selain yang berpusat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan di satuan pendidikan atau wilayah tiap kecamatan dan pemanfaatan kantor bekas Wilker untuk ruang sekretaris. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi beban transportasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Jika hal ini direalisasikan, maka akan tercipta keselarasan antara sistem absensi dan ruang lingkup kerja lapangan, menciptakan efisiensi yang lebih berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disarankan mempertimbangkan fleksibilitas sistem absensi, seperti memungkinkan *fingerprint* dilakukan di satuan pendidikan atau wilayah kecamatan tertentu guna meningkatkan efisiensi waktu dan mobilitas pengawas. Selain itu, pemanfaatan kembali kantor bekas Wilker sebagai ruang sekretariat atau ruang kerja pendukung di tingkat kecamatan dapat membantu menjaga efektivitas pembinaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif sedikit dan cakupan wilayah yang terbatas. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah partisipan yang lebih luas, mencakup wilayah yang berbeda, serta menggunakan pendekatan metode yang berbeda mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja pengawas

DAFTAR RUJUKAN

- Aksan, N., Kısac, B., Aydın, M., & Demirbukan, S. (2009). *Symbolic interaction theory*. 1, 902–904. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.160>
- Astutik, D. (2017). Telaah Kritis Gagasan Sosialisasi Mead: Self, Mnd, Society. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, Dan Antropologi*, 1(01), 61–79.
- Bijaksana, A. (2025). Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2244–2256. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/7697>
- Ditjen GTK Kemendikbudristek. (2023). Salinan Perdirjen GTK 7328 tentang Model Kompetensi Pengawas Sekolah. *Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan*. <https://kspstendik.dikdasmen.go.id/regulasi/detail/perdirjen-73282023-tentang-model-kompetensi-pengawas-sekolah>
- Erwiati, Hajani, Padang, S., Aceh, S., & Yuniar. (2022). Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(3), 185–195. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12660>
- Halik. (2024). Pendidikan sebagai Arena Simbolik: Telaah Konseptual Interaksionalisme Simbolik Gerogr H. Mead. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 3, 27–41.
- Imron, A. (2022). *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QYZ-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengawas+satuan+pendidikan&ots=zqHiS2OERT&sig=RzdgKGVnbJLSRsKBgyxiz9hCgKg&redir_esc=y#v=onepage&q=pengawas+satuan+pendidikan&f=false
- Kholidi, A. K., Irwan, & Faizun, A. (2022). AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadits Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead Di Era New Normal Pasca Covid 19 di Indonesia. *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an Dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Hukum Islam*, 2(15), 1.
- Lubis, Z. (2022). Upaya Pengawas Sekolah untuk Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Administrasi Sekolah Melalui Supervisi Manajerial di 3 SMA Binaan Kota Medan Tahun Pelajaran 2021/2022. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 154–166.
- Pamungkas, P., Khozin, M., Studi, P., Publik, A., Ekonomi, F., Sosial, I., & Aisyiyah, U. (2025). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul*. 7(September).
- Ritonga, R., Harahap, R., & Adawiyah, R. (2023). Pendampingan Pengawas Sekolah Penggerak Untuk Meningkatkan Kompetensi Dalam Melaksanakan Kegiatan Coaching. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(2), 01–12. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i2.604>
- Ritzer, G. (2010). *Sociological Theory* (Eighth Edi). The Mc-Graw-Hill Companies.
- Schröders, J., Nichter, M., Sebastian, M. S., & Nilsson, M. (2021). ' *The Devil* ' s

- Company ' : A Grounded Theory Study on Aging , Loneliness and Social Change Among ' Older Adult Children ' in Rural Indonesia*. 6(June), 1–23. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.659285>
- Setyawati, P., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2020). Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 8(3), 9208–9220. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/Jurnal Putri Setyawati \(07-01-20-04-42-18\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/Jurnal Putri Setyawati (07-01-20-04-42-18).pdf)
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Wulan, N., & Mahendra, G. K. (2025). *Analisis Faktor Pendukung Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Bantul Kota*. 7(September), 58–75.
- Aksan, N., Kısac, B., Aydın, M., & Demirbukan, S. (2009). *Symbolic interaction theory*. 1, 902–904. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.160>
- Astutik, D. (2017). Telaah Kritis Gagasan Sosialisasi Mead: Self, Mnd, Society. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, Dan Antropologi*, 1(01), 61–79.
- Bijaksana, A. (2025). Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2244–2256. <https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/7697>
- Ditjen GTK Kemendikbudristek. (2023). Salinan Perdirjen GTK 7328 tentang Model Kompetensi Pengawas Sekolah. *Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan*. <https://kspstendik.dikdasmen.go.id/regulasi/detail/perdirjen-73282023-tentang-model-kompetensi-pengawas-sekolah>
- Erwati, Hajani, Padang, S., Aceh, S., & Yuniar. (2022). Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(3), 185–195. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12660>
- Halik. (2024). Pendidikan sebagai Arena Simbolik: Telaah Konseptual Interaksionalisme Simbolik Gerogr H. Mead. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 3, 27–41.
- Imron, A. (2022). *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QYZ-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengawas+satuan+pendidikan&ots=zqHiS2OERT&sig=RzdgKGVnbJLSRsKBgyxiz9hCgKg&redir_esc=y#v=onepage&q=pengawas satuan pendidikan&f=false
- Kholidi, A. K., Irwan, & Faizun, A. (2022). AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadits Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead Di Era New Normal Pasca Covid 19 di Indonesia. *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an Dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Hukum Islam*, 2(15), 1.
- Lubis, Z. (2022). Upaya Pengawas Sekolah untuk Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Administrasi Sekolah Melalui Supervisi

- Manajerial di 3 SMA Binaan Kota Medan Tahun Pelajaran 2021/2022. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 154–166.
- Pamungkas, P., Khozin, M., Studi, P., Publik, A., Ekonomi, F., Sosial, I., & Aisyiyah, U. (2025). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul*. 7(September).
- Ritonga, R., Harahap, R., & Adawiyah, R. (2023). Pendampingan Pengawas Sekolah Penggerak Untuk Meningkatkan Kompetensi Dalam Melaksanakan Kegiatan Coaching. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(2), 01–12. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i2.604>
- Ritzer, G. (2010). *Sociological Theory* (Eighth Edi). The Mc-Graw-Hill Companies.
- Schröders, J., Nichter, M., Sebastian, M. S., & Nilsson, M. (2021). ‘ *The Devil ’ s Company ’ : A Grounded Theory Study on Aging , Loneliness and Social Change Among ‘ Older Adult Children ’ in Rural Indonesia*. 6(June), 1–23. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.659285>
- Setyawati, P., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2020). Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 8(3), 9208–9220. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/Jurnal Putri Setyawati \(07-01-20-04-42-18\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/Jurnal Putri Setyawati (07-01-20-04-42-18).pdf)
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Wulan, N., & Mahendra, G. K. (2025). *Analisis Faktor Pendukung Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Bantul Kota*. 7(September), 58–75.